



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR: 188.4.45/112 /I/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) perlu melakukan sosialisasi PBB dan BPHTB;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Pembentukan Tim Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 181);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 211);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 212).
13. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 29).

Memperhatikan: Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK/1985 JO Keputusan Bersama Dirjen Pajak dan Dirjen PUOD 30/kj-7/1997 dan Nomor 973-563 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau/ Bupati/ Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU :** Membentuk Tim Sosialisasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 dengan nama-nama dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas Tim Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- memberikan penjelasan kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang berhubungan dengan Obyek dan Subyek Pajak;
 - memberikan petunjuk tentang tata cara pendaftaran Obyek dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- KETIGA :** Untuk kelancaran Operasional sosialisasi Pengelolaan PBB dan BPHTB bagi Tim Intensifikasi Desa/ Kelurahan diberikan honorarium sebagai berikut:
- Lurah Rp.300.000,-
 - Kepala Desa Rp.200.000,-
 - Kepala Lingkungan/ Kolektor Kelurahan Rp.100.000,-
 - Kepala Desa/ Kolektor Desa Rp.100.000,-
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Luwu Utara pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2011, *Kode Rekening 5.2.1.01.01 dan 5.2.1.02.03.*
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba

pada tanggal 14 April 2011

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekretaris Daerah	
2. Asisten	
3. Ka. DPKD	
4. Kabid Pendapatan	

WAKIL BUPATI,

INDAH PUTRI INDRIANI

Tembusan : disampaikan Kepada Yth

1. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
3. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 112/IV/2011

TANGGAL 14 April 2011

**NAMA-NAMA DAN LOKASI TIM SOSIALISASI PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2011**

NO.	NAMA/ JABATAN	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	DUSUN/ LINGKUNGAN	KET.
1	2	3	4	5	6
1	- Para Lurah/ Kepala Lingkungan	MASAMBA	1 KAPPUNA	1. MATOTO 2. PONJING 3. KATOKKOAN 4. WELONA	
			2 BONE	1. PASAR SELATAN 2. PASAR UTARA 3. SA'PEK 4. PO'DO	
			3 KASIMBONG	1. LAMARANGINANG 2. BONE TUA 3. LIWA SARARA 4. KASAMBI 5. JALAJJA 6. KURRI-KURRI	
			4 BALIASE	1. LINDU 2. BALIASE 3. TO'LUMI	
	- Para Kepala Desa/ Kepala Dusun		5 KAMIRI	1. KAMIRI 2. LIMBONGBITTE	
			6 BALEBO	1. BONDE 2. BALOLI	
			7 MASAMBA	1. TONDO TUA 2. TOLIASA	
			8 LANTANG TALLANG	1. KARAWA 2. BALAWANG 3. BALAKALA	
			9 PINCARA	1. PINCARA 2. SALU BOMBANG 3. SALU SEBA	
			10 LABA/LEBANNU	1. LUMI 2. LABA 3. SALU SULE 4. KURRA	
			11 LAPAPA	1. LAPAPA 2. KUAU 3. PALLAWA	
			12 PANDAK	1. SALULEMO 2. PATOBU	
			13 ROMPU	1. PAMBUSU 2. KARRE	
			14 TORADDA	1. LAIRA 2. LAWARRONG 3. LABOMBA	
			15 POMBAKKA	1. PAKKALI 2. TOSAPU 3. MASARU 4. KALASE	
			16 PONGO	1. BULO 2. RURA BARU 3. TOREA 4. MALAPA	
			17 SEPAKAT	1. SEPAKAT 2. TOPOCCI 3. SALU LIMBONG 4. PANPLI	
			18 SUMILIN	1. LEMBANG BATU 2. SIMBOLONG	
			19 LERO	1. MAPPATUJU 2. MAIPI 3. LERO	
JUMLAH			19	60	

1	2	3	4	5	6
2		MAPPEDECENG	1. MAPPEDECENG 2. CENDANA PUTIH 3. HASANAH 4. SUMBER WANGI 5. URASO 6. KAPIDI 7. UJUNG MATTAJANG 8. BENTENG 9. HARAPAN 10. CENDANA PUTIH I 11. MANGALLE 12. MEKAR JAYA 13. TARRA TALLU 14. SUMBER HARUM 15. CENDANA PUTIH II	1. NANNA 2. MAPPEDECENG 3. TOBULO 4. PORODOA 5. BERINGIN 1. KARYA BAKTI 2. PURWOSARI 3. MERTASARI 1. SUMBERSARI 1 2. SUMBERSARI 2 1. SUMBERBARU 1 2. SUMBERBARU 2 1. URASO 2. KUMILA 3. KAMPUNGBARU 4. UJJA 1. KAPIDI 2. SUMBER ASE 3. SAPURAGA 4. LABEKA 5. ASE SELATAN 1. UJUNG MATTAJANG 2. KANDE API 3. GALINGGANG 1. HOMEBASE 2. BENTENG 3. TONAKKA 1. TAMBAKSARI 2. ADIL 3. HARAPAN 1. CENDANA PUTIH 1 2. BANPRES 3. SUWAKARSA 4. MEKAR SARI 1. MANGALLE 2. SUMBER JADI 3. TONDOK TANGNGA 1. BALI INDAH 1 2. BALI INDAH 2 3. SUMBER JAYA 1. TARRA TALLU 2. KALATEONG 3. BONE KALLUA 1. SUMBER HARUM 1 2. SUMBER HARUM 2 3. SUMBER HARUM 3 1. KARONDANG 2. MEKARSARI 3. BALISARI	
JUMLAH			15	49	

1	2	3	4	5	6
3		MALANGKE	1. MALANGKE 2. PATTIMANG 3. BENTENG 4. TOLADA 5. SALEKOE 6. PUTEмата 7. TINGKARA 8. LADONGI 9. TANDUNG 10. GIRI KUSUMA 11. TAKKALALA 12. PINCE PUTE 13. PETTA LANDUNG 14. TOKKE	1. MALANGKE 2. BABANAKAWALI 3. BIRUE 4. KARYA BARU 1. PATTIMANG 2. PADANGNGELLE 3. GAMPUA'E 4. LABALUBU 5. BIRO 1. CAPPASOLO 2. PADANG 3. BULOE 4. BENGKESE 1. LUMU-LUMU 2. TOPPAO 3. TOLADA 4. TOLANGANGGO 1. MAKITTA 2. BAHARI 3. SUMBER AGUNG SELATAN 4. SUMBER AGUNG TENGAH 5. SUMBER AGUNG UTARA 6. GELOMBANG 7. POLEWALI 8. TO'AWO 1. KALASE 2. KALOSSO 3. PAWELLAE 4. PADANGNGE 1. PUMMEMA 2. BULOI 3. PANANDARA 4. TINGKARA 1. TALANG-TALANG 2. ASSORONGAN 3. LUMU 4. LATIRENG 1. BABUE 2. TOAROGO 3. TANDUNG 4. LANDONGI 5. TANDUNG II 1. MARTASARI 2. SUMBER SARI 3. SUMBER INDAH 4. PADANG SARI 1. LEMBAH SUBUR 2. RAMPOANG 3. TAKKALALA 4. PAMOMBONG 1. LAROSSO 2. MARANNU 3. PINCEPUTE 1. PETTALANDUNG 2. LABUAJA 3. SALOBANCE 1. TOKKE 2. KAMP. BARU 3. TAPPONG	
JUMLAH			14	59	

1	2	3	4	5	6
4		MALANGKE BARAT	1. CENNING 2. PENGKAJOANG 3. PAO 4. ARUSU 5. BAKU-BAKU 6. WARA 7. WAELAWI 8. PEMBUNIAN 9. LIMBONG WARA 10. KALITATA 11. POMBAKKA 12. WAETUO 13. POLEJIWA	1. TUARA 2. SALO BONGKO 3. TO'BAKKA 4. URU KUMPANG 5. SALULEMO 6. TO'KATAPI 1. PANASAE 2. TOMPE 3. LABBU 4. KAMP. BARU 1. AMASSANGGAN I 2. AMASSANGGAN II 3. LASALAKA 1. KATONANTANA 2. LETTEKENG 3. TUARA 4. KATONANPRAJA 5. DONDO 6. RANTELANGI 1. BAKU-BAKU 2. UDU 3. KAMBUNO 4. LABUNAO 5. KAMBISA 6. TANETE LAMPE'E 7. TOMADEKKA 8. PANGKUNGNGE 1. LABOU 2. LANDONGDOU 3. WAERINNI 4. DURIAN BELA 5. PASASAI 6. TEPPPO 7. LAYAR PUTIH 1. LABECCE 2. LAMIKO-MIKO 3. WAELAWI 1. TO'TALLANG 2. BAKKUNG 3. PEMBUNIAN 1. TO' KALIKI 2. WARA 3. LIMBONG PARARANG 1. SUKABUMI 2. RINJANI 3. MANGKASA 4. RAWAMAKMUR 5. KALITATA 1. LAWATU 2. POMBAKKA 3. SAURU 4. WELAMPELLANG 1. WAETUO 2. TOMANASA 3. LANGKAI 4. SOLO 5. AJU BITTE 1. TO'BOLU 2. TETE NANNA 3. LEBANI 4. PANIMBU	
JUMLAH			13	61	

1	2	3	4	5	6
5		LIMBONG	1. MARAMPA 2. PENGKENDEKAN 3. KANANDEDE 4. RINDING ALLO 5. MINANGA 6. KOMBA 7. LIMBONG	1. PONGLEGEN 2. LOWARANG 3. AMBOAN 1. BALANNALU 2. BATUBARA 3. PANIWANGAN 4. URI 1. KANANDEDE 2. SALUKANAN 3. NASE 1. KAWALEAN 2. MANGANAN 3. SALURANTE 1. MINANGA 2. BUNTU BAIK 3. BATU API 1. KOMBA 2. PELAWEAN 3. LASA 1. LIMBONG 2. BORONG LEWA 3. SALUTALLANG	
JUMLAH			7	22	

1	2	3	4	5	6
6		SEKO	1. TIROBALI 2. BEROPPA 3. MALIMONGAN 4. TANAH MAKALEANG 5. HOYANE 6. EBONA TANA 7. LODANG 8. PADANG RAYA 9. PADANG BALUA 10. TALOTO 11. WONO 12. MARANTE	1. RANTEDANGA 2. SALOLE 3. BUAKAYU 4. MALAMBE 5. KARTAWON 1. SIPULUNG 2. BEROPPA 3. LEDAN 4. KAMPUNG BARU 1. KARIANGO 2. LANTANG TEDONG 1. POYAHANG 2. PASANG KALUA 3. POAK-POAK 4. HARANA 5. MALINO 6. POKAPAANG 1. PATTAHE 2. KATUHOANNA 3. HOYANE 1. PAWENEANG 2. KALAHA 3. BATTILANG 4. AMBALLONG 5. PALANDOANG 6. LAMBIRI 1. HARAPAN 2. SARURANG 3. LODANG 4. BALUANA 1. BENGKE 2. MATANNONA 3. BUSAK 1. ENO BARAT 2. ENO TIMUR 3. LISU PADANG 1. SINGKALONG 2. LORE 3. LENGKONG 4. PATOROANG 5. TADOYANG 6. KATU 1. TANETE BARAT 2. BANA 3. TANETE TIMUR 4. BONE 1. PARAWELEANG BARAT 2. PARAWELEANG TIMUR 3. KALAMIO 4. PARAMPUNGAN	
JUMLAH			12	50	

1	2	3	4	5	6
7		RAMPI	1. RAMPI 2. ONONDOA 3. TE'DEBOE 4. LEBONI 5. SULAKU 6. DODOLO	1. LUMBU RAMPI 2. BANGKO 1. ONONDOA I 2. ONONDOA II 3. ONONDOA III 4. ONONDOA IV 1. PONGKA 2. MOLINO 3. POROKIU 4. RANTE 1. WILANDE 2. BELOI 1. SULAKU 2. BURERE 3. POMOTOA 4. LAPANGAN 1. DODOLO 2. KONTARA	
JUMLAH			6	18	